KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ketua KPKHati-hati, Jaga Lidah
Tanggal : Selasa, 05 September 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9

BERSETERU DENGAN DPR

Ketua KPK Hati-hati, Jaga Lidah

ANCAMAN Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Anggotat Pansus Angket bikin perseteruan DPR dengan KPK makin meruncing. DPR pun balas mengancam akan mempolisikan Agus dengan tuduhan abuse of power. Agar perseteruan tak memanas, Ketua KPK disarankan agar hati-hati menajag lidahnya.

Omongan Agus yang bikin panas anggota DPR itu disampaikan Kamis lalu. Saat itu, Agus menyampaikan rencananya menggunakan pasal obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum. Menurut Agus,

BERSAMBUNG KE HAL 9

Kata Bamsoet, Sisi Gelap KPK Mulai Terkuak

Ketua KPK

... DARI HALAMAN 1

apa yang dilakukan Pansus Angket KPK selama ini menghambat penegakan hukum yang dilakukan KPK, satu di antaranya kasus korupsi e-KTP. "Kami sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus (pasal) obstruction of justice kan bisa kami terapkan," kata Agus di kantornya.

Aturan yang mengatur menghalang-halangi proses penegakan hukum tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Tipikor. Pasal itu mengancam pelakunya dengan hukuman penjara minimal tiga tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

Tak terima diancam begitu, Komisi III DPR pun berencana untuk melaporkan Agus ke Bareskrim. Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, wacana ini semakin menguat. Menurut politikus PPP ini apa yang disampaikan Agus menunjukkan abuse of power seorang pimpinan institusi penegak hukum. Hal itu tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang memastikan tidak ada lembaga negara yang absolute dan tidak bisa dikontrol. "Padahal apa yang kami lakukan adalah mengontrol dan mengawasi KPK," kata Arsul, di kompleks Parlemen DPR, kemarin.

Senada disampaikan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang menilai, ancaman yang disampaikan Agus Rahardjo sudah di luar batas. "Pernyataan tersebut jelas offside dan arogan serta mengandung konsekuensi hukum," kata Bambang. Politikus Golkar itu menyebut ancaman Agus merupakan salah satu bentuk kegalauan pimpinan KPK. Sebab, pada akhirnya sisi gelap KPK mulai terkuak di Pansus Hak Angket.

"Bukan oleh orang lain, tapi oleh orang dalam sendiri yang sudah tidak tahan lagi melihat institusi KPK yang begitu dipercaya rakyat disalahgunakan," katanya.

Padahal, kata dia, seharusnya pimpinan KPK justru melakukan introspeksi diri. Apalagi, menurut Bambang dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi sudah menyentil KPK.

Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengatakan, rencana melaporkan Agus sudah hampir bulat. Politikus Nasdem ini menilai apa yang disampaikan Agus keterlaluan, melecehkan lembaga negara. Taufiqulhadi menyebut, jika ucapan Agus tidak disikapi, wibawa DPR akan hancur.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, suasana kebatinan di DPR saat ini tengah solid. Sehingga apa yang dilakukan Pansus Angket sulit dihentikan. "Suara kali ini terlihat solid, ada perasaan kolektif yang sama yang ditunjukkan DPR dalam merespons tindakan-tindakan KPK selama ini dan juga dalam menggunakan hak inisiatifnya (hak angket)," kata Siti, kemarin.

Karena itu, lanjut Siti, pimpinan KPK mestinya pintar-pintar jaga lidah. Jangan sampai menyerang penggunaan hak angket yang memang melekat dan dapat digunakan DPR. KPK harus pintar-pintar berkomunikasi. Jangan malah komunikasi yang disampaikan komisioner KPK bikin tambah ruwet.

Dengan fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada DPR, diharapkan hak angket bisa mencerahkan dan mengedukasi serta bisa memberikan kejelasan. "Ini yang mesti didorong KPK. Bukan sebaliknya, malah mengaburkan proses pemberantasan korupsi," kata Siti.

Siti menambahkan, kritikan dan sinisme DPR itu mesti dijawab KPK dengan kinerja. "Tak perlu kaget dan heran dengan apa yang disampaikan DPR. Menghadapi DPR, KPK hanya perlu menjalankan prosedural sesuai aturan. Tak perlu mengancam," pungkasnya. ■ BCG